



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditemukan ketidaktepatan penggunaan indikator kinerja dalam mengukur dan menggambarkan capaian sasaran strategis sehingga dianggap perlu dilakukan perubahan terhadap indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SRPD
				ORG

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
8. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013-2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 31 Oktober 2018

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>
Unit Pengelola/SKPD	<i>[Signature]</i>
ORG	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

[Signature]

RIANOVA

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013-2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2013 - 2018**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Panjang jalan kondisi mantap	Persentase	$\frac{\sum \text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\sum \text{Panjang jalan secara keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kapuas
2.	Meningkatnya cakupan layanan air bersih	Persentase penduduk berakses air minum	Persentase	$\frac{\sum \text{Kepala keluarga terlayani air bersih}}{\sum \text{Kepala Keluarga se Kabupaten Kapuas}} \times 100\%$	1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kapuas 2. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat	Persentase rumah layak huni	Persentase	$\frac{\sum \text{Rumah layak huni}}{\sum \text{Rumah tinggal se Kabupaten Kapuas}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kapuas
4.	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian	Tingkat Produksi Pertanian	Ku/ha	$\sum \text{Produksi padi yang berhasil dipanen per satuan luas lahan}$	Dinas Pertanian Kab. Kapuas
		Tingkat Produksi Perikanan	Ton	$\sum \text{Hasil penangkapan ikan di perairan laut dan perairan umum (sungai, danau dan rawa) di tambah hasil produksi budidaya ikan dengan jenis usaha budidaya ikan di kolam, karamba dan tambak.}$	Dinas Perikanan Kab. Kapuas
		Tingkat Produksi Peternakan	Ton	$\sum \text{Produksi ternak sapi, kerbau, kambing, babi, ayam buras, ayam ras, ayam arab dan itik.}$	Dinas Pertanian Kab. Kapuas

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	ORG <i>[Signature]</i>

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB
		Tingkat Produksi Peternakan	Ton	Σ Produksi ternak sapi, kerbau, kambing, babi, ayam buras, ayam ras, ayam arab dan itik.	Dinas Pertanian Kab. Kapuas
5.	Meningkatnya Ketahanan pangan daerah dan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	Persentase	Ketersediaan Pangan (Fd) $= \frac{TS (O + \Delta St + M - X) - TG (F + S + W)}{TG (F + S + W)}$ TS = Total Penyediaan (Supply) O = Produksi ΔSt = Perubahan stok (stok akhir- stok awal) M = Impor X = Eksport TG = Total Penggunaan F = Pakan S = Bibit/benih W = Tercecer	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kapuas
6.	Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah sungai utama kualitas airnya memenuhi status mutu kelas IV	Persentase	$\frac{\Sigma \text{Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV}}{\Sigma \text{Sungai utama di Kabupaten Kapuas}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas
		Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	Persentase	$\frac{\Sigma \text{Kualitas udara di titik pantau yang memenuhi mutu baku}}{\Sigma \text{Titik kualitas udara yang dipantau}} \times 100\%$	
7.	Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja	Nilai Investasi	Rupiah	Σ Investasi di Kab. Kapuas dalam 1 (satu) tahun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unif Pengelola/SKPD
				02-6

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB
8.	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pengembangan ekonomi lokal	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (K-UMKM) aktif	Persentase	$\frac{\sum \text{Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah aktif}}{\sum \text{Kecil dan Menengah yang terdata di Kabupaten Kapuas}} \times 100\%$	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kapuas
9.	Terwujudnya perlindungan atas hak tanah masyarakat	Persentase sengketa tanah masyarakat yang terselesaikan	Persentase	$\frac{\sum \text{Kasus sengketa tanah masy. yang diselesaikan}}{\sum \text{Kasus sengketa tanah masy. yang terdata}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Sengketa tanah masyarakat yang diselesaikan merupakan sengketa tanah masyarakat yang telah selesai dengan hasil kesepakatan pihak bersengketa melalui mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.</p>	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Kapuas
10.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ <p>a = 0 z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), y_i < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk. Sumber data : Kapuas Dalam Angka - BPS Kab. Kapuas.</p>	Dinas Sosial Kab. Kapuas
11.	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persentase	$\frac{\sum \text{penduduk angkatan kerja}}{\sum \text{Penduduk usia kerja (15 - 64 tahun)}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja Kab. Kapuas

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
				ORG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB
12.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	$\frac{(\sum \text{Pendapatan tahun } n) - (\sum \text{Pendapatan tahun } n - 1)}{\sum \text{Pendapatan tahun } n - 1} \times 100\%$	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kapuas
13.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka melek huruf	Persentase	$\frac{\sum \text{Penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis}}{\sum \text{Penduduk usia di atas 15 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan Kab. Kapuas
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	$\frac{\sum \text{Tahun bersekolah individu diatas 15 thn}}{\sum \text{Penduduk di atas 15 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan Kab. Kapuas
14.	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mampu hidup mandiri	Persentase	$\frac{\sum \text{PMKS yang mampu mandiri}}{\sum \text{Seluruh PMKS yang dibina}} \times 100\%$	Dinas Sosial Kab. Kapuas
15.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan hidup	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan Kab. Kapuas
16.	Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah	Persentase pendapatan pada sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase	$\frac{\sum \text{Pendapatan dari sektor pariwisata}}{\sum \text{PAD Kab. Kapuas}} \times 100\%$ Keterangan : Pendapatan dari sektor pariwisata terdiri dari perolehan pendapatan (pajak) dari hotel, restoran dan tempat hiburan	1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kapuas 2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Kapuas
17.	Meningkatnya pelayanan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pembangunan	Menurunnya konflik dimasyarakat akibat dampak pembangunan	Konflik	$\sum \text{Konflik dimasyarakat akibat dampak pembangunan pada tahun } n - \sum \text{Konflik dimasyarakat akibat dampak pembangunan pada tahun } n-1$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas
18.	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Tingkat keberhasilan pencapaian zero growth konflik kerukunan antar umat beragama	Persentase	$\frac{\sum \text{Konflik bernuansa SARA yang terjadi}}{\sum \text{Konflik bernuansa SARA yang terjadi tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kapuas

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB
19.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kinerja daerah	Opini BPK	Opini	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas	1. Inspektorat Kab. Kapuas 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kapuas
		Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Kategori	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Kapuas oleh Kementerian PAN dan RB	1. Inspektorat Kab. Kapuas 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas 3. Bagian Organisasi Setda Kab. Kapuas
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	Rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik	1. SKPD penyelenggara Pelayanan Publik 2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kapuas

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	4
ASISTEN	1
KABAG <i>ME</i>	1
KASUBBAG	1
PELAKSANA	2
Unit Pengelola/SKPD	1
<i>ORG</i>	